

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DESA
(Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: mia_chocolate09@yahoo.co.id

***Abstract:** This study aimed to describe Role of Village Government in Empowering Village Sumberpasir Pakis Sub district Malang District. based on the fact, most of livelihood's Sumberpasir Villagers is farm and level of public education in the productive age tends to below. In this study the authors use descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Based on the research that has been done can be concluded that the village government of Sumberpasir can empower people through several development programs are: The first is activation of the institution, the second is increasing public participation in the implementation of communal work activities, the race village, the village musrenbangdes and physical development, The third is increase in productive economic with activity training of black smiths and embroidery. But, in the implementation of an empowerment society, village government Sumberpasir had some constrains such as lack of community participation, lazy culture and the lack of facilities available to support development activities.*

Keywords: empowerment, village government

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam memberdayaan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. berdasarkan kenyataan yang ada desa Sumberpasir merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. akan tetapi dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.

Kata kunci: pemberdayaan, pemerintah desa

Pendahuluan

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokra-

si, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah Peran Pemerintah Desa Sumberpasir. Desa Sumberpasir merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, secara geografis Desa Sumberpasir terletak di wilayah timur, yang memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 320,772 ha dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani sebanyak 145 dan jumlah buruh tani berjumlah 358. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah penggunaan tanahnya yang berjumlah 232 ha digunakan untuk lahan pertanian.

Selain itu ketidakmampuan sarana dan infrastruktur ekonomi dalam menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Berdasarkan data potensi desa tahun 2012 menunjukkan masyarakat yang berusia produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 672 orang sehingga jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di desa Sumberpasir sebanyak 620 keluarga. melihat banyaknya pengangguran di desa tsb, maka peran Pemerintah Desa Sumberpasir untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dilakukan program pemberdayaan salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat desa Sumberpasir. sebagai pembinaan dan pengkoordinasi jalannya roda pemerintahan ,maka Pemerintah Desa Sumberpasir melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan kelembagaan Unit Pengelola Keuangan (UPK), peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif masyarakat. Dengan adanya peran Pemerintah Desa tersebut pada tahun 2011 desa Sumberpasir masuk dalam seleksi lokasi desa mandiri oleh Bidang PKP Bapemas Provinsi Jawa Timur (bapemas.jatimprov.co.id).

Akan tetapi, dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, Pemerintah Desa Sumberpasir banyak mengalami kendala-kendala salah satunya kurang partisipasi dan budaya malas yang ada dalam diri masyarakat desa Sumberpasir.

Dari uraian di atas, penelitian ini ingin mengetahui peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa Sumberpasir, upaya Pemerintah Desa dalam memberdayakan serta faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Tinjauan pustaka

1. Pembangunan

Menurut S.P. Siagian (2000,h.2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2001,h.113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

2. Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo, 1971, h.195-196).

Selain itu menurut Tjokroamidjojo suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri.
6. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Tjokroamidjojo, 1974, h. 195-196).

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan”(A.W. Widjaja, 1983, h.19).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

4. Pemberdayaan

Menurut Parsons, *et.al.* 1994 (dalam Suharto, 1997, h.210-224), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

5. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005, h.18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Nazir (1988, h.63) bahwa “metode deskriptif adalah suatu metodologi dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang.

Menurut Koentjaraningrat (1990, h.29) bahwa penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (2) Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (3) Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Adapun Peran dari Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan

Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberpasir dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Mengaktifkan kelembagaan UPK.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM).
4. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program-Program

Pemerintah Desa Sumberpasir Sebelum membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, BPD serta Pemerintah Desa.

Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) peran pemerintah Desa Sumberpasir dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat pada poin pertama yaitu menekankan pendekatan dari bawah (bottom up approach). dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Desa Sumberpasir bisa membuka kesempatan kepada masyarakat desa Sumberpasir untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan.

Berikut program-program pembangunan masyarakat Desa Sumberpasir pada periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

1. Pengaktifan Kelembagaan UPK
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan kerja bakti
 - b. Musrenbang desa
 - c. Perlombaan Desa
 - d. Pembangunan Fisik
3. Peningkatan ekonomi produktif, dengan kegiatan:
 - a. Pelatihan pembuatan pande besi
 - b. Pelatihan keterampilan bordir

c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina

Kepala Desa Sumberpasir mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa Sumberpasir mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut *United Nations* (1956, h.83-92 dalam Tampubolon, 2006) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan dari pemerintah desa sumberpasir dalam meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberpasir secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam bidang ekonomi

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok padi serta perbaikan irigasi. sebelum diadakan penyuluhan-penyuluhan dari dinas pertanian masyarakat desa Sumberpasir sering mengalami masalah dalam memberantas hama serta pola tanam. Penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani desa Sumberpasir selain dapat menambah pengetahuan tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit padi yang baik pada saat musim rendengan maupun ketigo, petani desa sumberpasir juga diberikan bantuan murah melalui Gapoktan, dalam hal ini petani yang ada

didesa Sumberpasir diberi kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkriditan rakyat yang dikelola oleh UPK Amanah yang ada didesa Sumberpasir sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal dan cicilan dalam pembelian pupuk maupun obat-obat pertanian .

2. Pembinaan dalam bidang kesehatan

Kegiatan posyandu yang ada didesa Sumberpasir berjalan dengan baik, hal ini terbukti adanya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di 6 posyandu di tiap dusun sedangkan untuk kegiatan posyandu lansia diadakan 2 bulan sekali hal ini dikarena posyandu lansia hanya berjumlah 1 tepatnya di dusun Gagakasinan. Kegiatan posyandu tersebut mempunyai banyak manfaat bagi kaum ibu-ibu, lansia wanita serta anak-anak balita, selain mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka juga bisa mendapatkan pengobatan gratis.

3. Pembinaan dalam bidang keagamaan

Pemerintah Desa Sumberpasir bersama LPMD melakukan pembinaan kepada masyarakat desa Sumberpasir melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti jamaah tahlil, jamaah khataman, jamaah tiba', jamaah yasinan. kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap seminggu sekali masyarakat desa Sumberpasir bisa mendapatkan siraman rohani serta bisa mempererat hubungan tali silaturahmi antar warga desa, selain itu juga pemerintah desa akan dengan muda untuk membina serta mengkoordinir kegiatan keagamaan. untuk menunjang Kenyamanan dan kelancaran dalam beribadah masyarakat desa maka Pemerintah Desa Sumberpasir memberikan bantuan-bantuan baik berupa dana atau tenaga untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah seperti: renovasi mushollah yang ada di dusun Krajan, renovasi mushollah yang ada di dusun Ngerangin, renovasi masjid Darussalam yang ada di dusun Gagakasinan, renovasi masjid yang ada di dusun Botohputih serta renovasi masjid jami' yang ada didusun Krajan.

4. Pembinaan dalam bidang kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberpasir melalui Sosialisasi tentang bahaya narkoba, kegiatan tersebut dilakukan setiap 2 tahun sekali, dimana kegiatan sosialisasi tersebut Pemerintah Desa Sumberpasir bekerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Malang. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat desa Sumberpasir bisa lebih berhati-hati, mencegah serta bisa memberantas penyalagunaan narkoba yang ada di lingkungan desa Sumberpasir.

5. Pembinaan dalam bidang pendidikan

Pemerintah Desa Sumberpasir melakukan pembinaan dibidang pendidikan dengan peningkatan sarana pendidikan salah satunya penambahan lokal (Kelas) PAUD Al-Hikmah yang ada di dusun Krajan selain itu Pemerintah Desa Sumberpasir dalam mensukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya. akan tetapi jika masyarakat tersebut tergolong menengah keatas pemerintah desa memunggut biaya sebesar Rp. 5.000.

6. Pembinaan dalam bidang keamanan

Pemerintah Desa Sumberpasir dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam bidang keamanan terbukti dengan diadakannya kegiatan siskamling setiap hari. dimana setiap KK (Kepala Keluarga) mendapat giliran 1 (satu) kali dalam seminggu, apabila ada salah satu warga yang tidak bisa hadir maka mereka akan menggati dihari berikutnya.

Sebelum diadakannya kegiatan siskamling kondisi keamanan desa sumberpasir diwarnai dengan banyaknya kejahatan salah satunya dengan kejadian pencurian kendaraan sepeda motor warga serta penjabretan yang pernah terjadi di dusun Krajan. maka dari itu pemerintah desa Sumberpasir mengadakan kegiatan siskamling secara bergiliran sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dan stabil bagi warga Desa Sumberpasir.

2. Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Pemerintah Desa Sumberpasir beserta LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan peran serta masyarakat dan fungsi lembaga-lembaga desa dengan menetapkan program-program pemberdayaan sebagai berikut:

a. Pengaktifan Kelembagaan UPK

Pemerintah desa Sumberpasir memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah atau 1,5 persen melalui UPK Amanah, dimana setiap warga yang diberi pinjaman akan mencicil pembayarannya melalui UPK yang ada di desa. dengan aktifnya lembaga UPK Amanah yang ada di desa Sumberpasir masyarakat desa Sumberpasir tidak perlu repot-repot meminjam modal ditempat lain. Pemberian pinjaman modal dari UPK Amanah dengan bunga yang rendah akan memudahkan masyarakat desa Sumberpasir dalam melakukan pinjaman modal untuk berwirausaha sebelum aktifnya lembaga UPK Amanah kebanyakan dari masyarakat desa melakukan peminjaman kereternir atau bank lain dengan bunga yang lebih tinggi dari UPK Amanah sehingga akan merugikan masyarakat desa yang ingin berwirausaha.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Pemerintah desa Sumberpasir dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kerja Bakti

Pelaksanaan gotong royong dan kerja bakti yang ada di Desa Sumberpasir dilakukan setiap satu bulan sekali tepatnya hari minggu. sebelum melakukan kegiatan kerja bakti pemerintah desa terlebih dahulu mengumpulkan Kepala dusun, RT, RW,

BPD beserta LPMD dari kegiatan tersebut kepala desa menunjuk Kepala Dusun untuk mengkoordinir untuk kegiatan tersebut. dengan adanya kegiatan kerja bakti akan menyatukan warga yang jarang bertemu atau jarang bersosialisasi untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

2. Perlombaan Desa

Dengan mengikuti lomba desa yang diadakan oleh BKM Kabupaten Malang. menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir mempunyai tujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa: Penguatan lembaga kemasyarakatan, peningkatan motivasi masyarakat dan swadaya melalui Kegiatan gotong royong.

3. Musbangdes

Pemerintah Desa Sumberpasir menetapkan program-program Pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dalam hal ini pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan seperti kepala dusun, ketua LPMD, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun.

4. Pembangunan Fisik

Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Sumberpasir sumber pembiayaannya sebagian berasal dari pemerintah pusat yang melalui PNPM, sebagian lagi berasal dari pemerintah desa yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan sebagian lagi berasal dari swadaya masyarakat desa. Program pemberdayaan yang berupa pembangunan fisik meliputi perbaikan jalan, irigasi, perbaikan jembatan, dll. Dalam pembangunan fisik pemerintah desa Sumberpasir bekerjasama dengan ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD dan Kaur Pembangunan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

c. Peningkatan Ekonomi Produktif

Untuk meningkatkan usaha ekonomi yang produktif bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa Sumberpasir mengalami banyak kendala seperti keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM maka pemerintah desa bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa. Adapun bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa Sumberpasir adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Pande Besi

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberian pelatihan salah satunya dengan pelatihan pembuatan Pande besi yang bekerjasama dengan dinas industri dan pertanian dalam memberikan pelatihan tentang pembuatan cincin pisau dan gagang pisau dengan baik serta bisa meningkatkan kualitas serta model-model yang bisa meningkatkan harga jual panden masyarakat. dengan kegiatan pemberian pelatihan dan peningkatan model-model desain pembuatan Pande besi yang ada di Desa Sumberpasir berjalan dengan baik hal ini tunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengrajin pada tahun 2009 berjumlah 2 orang dan pada tahun 2012 jumlah pengrajin menjadi 12 orang selain itu Pemerintah Desa Sumberpasir memberikan kemudahan kepada pengerajin Pande Besi dengan memasarkan hasil produksinya melalui UPK Amanah serta bazar-bazar maupun pameran ditingkat Kabupaten.

2. Pelatihan Bordir

Pelatihan membordir yang ada di desa Sumberpasir semakin meningkatkan sumber daya masyarakat desa. hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pengerajin bordir yang ada di desa Sumberpasir semakin tahun semakin meningkat dengan jumlah 115 pengerajin Dengan adanya kegiatan membordir yang ada didesa Sumberpasir diharapkan bisa

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa Sumberpasir khususnya kaum ibu-ibu selain itu pemerintah desa juga memberikan kemudahan kepada pengerajin bordir dalam menampung hasil kerajinannya untuk dipasarkan melalui Koperasi Sakina atau bazar-bazar.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat desa Sumberpasir yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta dalam Memberdayakan Masyarakat

Kerjasama yang dilakukan Dalam Pemerintah Desa Sumberpasir dengan pihak swasta yaitu dengan memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan serta keamanan lingkungan, Sedangkan dari pihak swasta, kerjasama akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif desa sebagai desa tujuan investasi selain itu juga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran masyarakat desa Sumberpasir. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari pemerintah desa Sumberpasir yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta pembuat kebijakan yang memihak masyarakat desa Sumberpasir sedangkan dipihak masyarakat, masyarakat akan memperoleh kesempatan pekerjaan dan berwirausaha sedangkan dipihak swasta akan memperoleh keuntungan dalam hal perijinan serta lingkungan yang kondusif.

2. Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam mensukseskan kelancaran dalam pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir. Dengan adanya anggaran dana yang sesuai dengan target maka pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir cepat terealisasi. Salah satunya pembangunan drainase yang ada didusun Ngerangin RT 15 RW 04 yang mana sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp. 2.100.00,00 dan sebagian dana berasal dari swadaya masyarakat yang berjumlah Rp. 900.00,00 dengan adanya dana tersebut maka pembangunan sarana drainase yang ada didusun Ngerangin cepat terealisasi dan sesuai dengan target penyelesaian.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat desa Sumberpasir tergolong kurang hal ini terbukti masih ada masyarakat desa Sumberpasir yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat ..

2. Budaya Malas

Pemerintah Desa Sumberpasir telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan salah satunya pelatihan membordir. Dalam pelatihan tersebut masyarakat dibekali pengetahuan tentang cara mendesain, memadukan benang, manajemen pemasaran produksi serta pemotongan busana akan tetapi hasil dari pelatihan tersebut masih ada saja masyarakat yang belum bisa mempraktekan latihannya dengan alasan kesibukan mereka baik dalam mengurus anak ataupun membantu suami di sawah.

3. Ketersediaan Fasilitas

Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian seperti LCD, Papan Tulis, Proyektor, Materi

Penyuluhan serta ketersediaannya tempat duduk yang memadai membuat kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Sumberpasir menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Desa Sumberpasir telah menjalankan perannya dengan baik, yang dibuktikan dengan masuknya desa Sumberpasir dalam seleksi desa mandiri pada tahun 2011. hal ini dapat dilihat melalui, *Pertama* sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, antara lain yaitu: Pengaktifan kelembagaan UPK (Unit Pengelola Keuangan) “Amanah”, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan ekonomi produktif. *Kedua* sebagai pelaksana kebijakan, *Ketiga* sebagai pembina kehidupan

masyarakat yang mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pelayanan kesehatan, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang keamanan serta bidang kepemudaan. Melalui program-program tersebut pemerintah desa Sumberpasir bisa memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa

2. Pemerintah Desa Sumberpasir mempunyai kerjasama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sumberpasir yaitu partisipasi masyarakat, budaya malas yang ada dalam diri masyarakat desa Sumberpasir serta kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan yang ada di desa hal ini menyebabkan program-program pemberdayaan menjadi terhambat.

Daftar Pustaka

- Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan** [Internet] Available from: <http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-pkp/271-pengembangan-desa-mandiri-berbasis-kawasan-perdesaan> > [Accessed: 14 Maret 2013]
- Koentjaraningrat (1990) **Metode-Metode Penelitian Masyarakat**. Jakarta, Gramedia.
- Nazir, Moh. (2005) **Metodologi Penelitian**. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Paul, Samuel. (1987) **Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience**. Washington DC, The World Bank.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 **tentang Desa**
- Siagian, Sondang P (2007) **Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya**. Jakarta, Gunung Agung.
- Suharto, Edi. (2006) **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**. Bandung, Refika Aditama.
- Sutrisno, D. (2005) **“Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.”** Tugas Akhir tidak diterbitkan, Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1985) **Perencanaan Pembangunan**. Jakarta, Haji Masagung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1974) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, LP3ES.
- Tampubolon, Mangatas. (2006) **Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah**. [Internet] Available from:

http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm.

[Accessed: 13 Maret 2013]

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**

Widjaja, AW (2003) **Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah**. Jakarta, Raja Grafindo Persada .